



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa r
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

©Himpunan karya tulis milik UIN Suska Riau

University of Sultan Syarif Kasim Riau

**PELAKSANAAN SOSIALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
 DESA OLEH PEMERINTAH DESA MUARA UWAI KEPADA MASYARAKAT
 BERDASARKAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI
 NOMOR 114 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN
 PEMBANGUNAN DESA**

SKRIPSI

Diajukan untuk Melengkapi Sebagai Syarat Guna Memperoleh Gelar
 Sarjana Ilmu Hukum (SH)



OLEH

MHD IRWANUL HAKIM
NIM: 11627103937

PROGRAM S1

JURUSAN ILMU HUKUM

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

PEKANBARU

2021

PERSETUJUAN

Skripsi dengan judul ***“Pelaksanaan Sosialisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Oleh Pemerintah Desa Muara Uwai Kepada Masyarakat Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa”*** yang ditulis oleh:

Nama : MHD IRWANUL HAKIM

NIM : 11627103937

Program Studi : ILMU HUKUM

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 08 Juli 2021

Pembimbing Skripsi



Muslim, S.Ag, S.H, M.Hum
NIP. 197205052014111002



b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul *"PELAKSANAAN SOSIALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA OLEH PEMERINTAH DESA MUARA UWAI KEPADA MASYARAKAT BERDASARKAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 114 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN PEMBANGUNAN DESA"* yang ditulis oleh :

Nama : **MHD IRWANUL HAKIM**

NIM : 11627103937

Program Studi : Ilmu Hukum

Telah dimunaqasahkan pada :

Hari / Tanggal : Selasa, 27 Juli 2021

Waktu : 13.00 WIB

Tempat : Daring (Online)

Telah di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sutan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 2 Agustus 2021

TIM PENGUJI MUNAQSAH

Ketua

Firdaus, SH., MH.

Sekretaris

Ilham Akbar, SH., MH

Penguji I

Peri Pirmansyah, SH., MH

Penguji II

Lysa Angraini, SH., MH

Mengetahui:

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Dr. H. Zulkifli, M. Ag

NIP. 19741006 200501 1 005

SURAT PERNYATAAN KEABSAHAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : MHD IRWANUL HAKIM
NIM : 11627103937
Tempat/Tanggal Lahir : Bangkinang / 28 Oktober 1997
Program Studi : ILMU HUKUM
Fakultas : SYARIAH DAN HUKUM
Universitas : UIN SUSKA RIAU

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “ **PELAKSANAAN SOSIALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA OLEH PEMERINTAH DESA MUARA UWAI KEPADA MASYARAKAT BERDASARKAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 114 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN PEMBANGUNAN DESA** ” adalah benar karya saya sendiri atau bukan plagiat hasil karya orang lain.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini bukan hasil karya saya sendiri atau plagiat hasil karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 02 Agustus 2021

Yang membuat pernyataan



MHD IRWANUL HAKIM
NIM: 11627103937

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Mhd Irwanul Hakim (2021) : Pelaksanaan sosialisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa oleh Pemerintah Desa Muara Uwai kepada Masyarakat berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa

Dalam Pasal 59 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa. Menyebutkan bahwa: (1) Kepala Desa menginformasikan dokumen RKP Desa, APB Desa dan rencana kerja kepada masyarakat melalui sosialisasi kegiatan; (2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan antara lain melalui: (a) Musyawarah pelaksanaan kegiatan desa; (b) Musyawarah dusun; (c) Musyawarah kelompok; (d) Sistem informasi desa berbasis website; (e) Papan informasi desa; dan (f) Media lain sesuai kondisi desa. Berdasarkan hasil observasi penulis di Desa Muara Uwai Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar, bahwasanya selama ini APB Desa setelah sah menjadi peraturan desa tidak ada disosialisasikan oleh pemerintah desa kepada masyarakat. Adapun tujuan dari penelitian ini untuk Mengetahui Pelaksanaan Sosialisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Oleh Pemerintah Desa Muara Uwai Kepada Masyarakat Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa dan Mengetahui Faktor Penghambat Sosialisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Oleh Pemerintah Desa Muara Uwai Kepada Masyarakat Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris atau sosiologi hukum, melihat sesuatu kenyataan hukum di dalam masyarakat atau sinkronisasi antara hukum dengan masyarakat. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah *purposive sampling*. Sumber data dalam penelitian ini yaitu data primer, sekunder dan tersier. Analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif dan penarikan kesimpulan secara induktif. dari penelitian ini dapat diketahui bahwa sosialisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa oleh Pemerintah Desa Muara Uwai kepada masyarakat berdasarkan Pasal 59 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa tidak terlaksana dengan baik. Sedangkan faktor penghambatnya yaitu kurangnya ketanggapan Pemerintah Desa serta kondisi desa yang belum memadai.

Kata Kunci : *Sosialisasi, Pemerintah Desa, Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa*



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim....

Alhamdulillah, puji syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT, karena berkat rahmat dan hidayah-Nya penulis diberi kesehatan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

Shalawat beserta salam tak lupa penulis ucapkan kepada Nabi Muhammad SAW, sebagai junjungan kita yang telah membawa manusia dari yang tak berilmu sampai kepada manusia berilmu dan beriman.

Dengan izin dan rahmat yang Allah berikan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Pelaksanaan Sosialisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Oleh Pemerintah Desa Muara Uwai Kepada Masyarakat Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa”**. Syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Penulisan skripsi ini, penulis banyak mendapatkan bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, terutama keluarga besar penulis, yaitu Ayahanda Abu Bakar B.Sc dan Ibunda Nurhayati tercinta dan tersayang yang telah bersusah payah mendidik dan menjaga penulis dari kecil hingga saat ini, selalu memberikan nasehat dan masukan, dan senantiasa mendoakan penulis disetiap waktu agar dapat meraih cita-cita serta doa dan ridho dari ayah dan ibu yang selalu penulis harapkan. Selain itu, pada kesempatan ini penulis juga ingin menyatakan dengan penuh hormat ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Rektor UIN Suska Riau Prof. DR. Khairunnas Rajab, M.Ag beserta wakil Rektor I, II, dan III yang telah berjasa memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau.
2. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum yaitu Dr. Zulkifli, M.Ag beserta pembantu Dekan I, II, dan III yang telah memberikan kemudahan selama penulis lakukan perkuliahan serta proses pengajuan judul skripsi.
3. Bapak Asril, S.H, M.H selaku Ketua Jurusan Ilmu Hukum serta Sekretaris Jurusan Bapak M. Alpi Syahrin, S.H, M.H yang telah memberikan bantuan kepada penulis menuntut ilmu di jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau.
4. Dr. Drs. Heri Sunandar, M.CL selaku Penasehat Akademis yang telah memberikan banyak bantuan kepada penulis selama penulis menuntut ilmu di Fakultas Syariah dan Hukum.
5. Bapak Muslim, S.Ag, S.H, M.Hum selaku dosen pembimbing yang telah banyak memberikan ide dan saran serta selalu sabar kepada penulis dalam penelitian ini.
6. Bapak/ibu dosen dan seluruh pegawai pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau.
7. Kepala Desa Muara Uwai, dan seluruh staff jajarannya yang telah mengizinkan penulis melakukan penelitian dan banyak membantu penulis dalam mendapatkan informasi.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

8. Pimpinan pustaka dan segenap karyawannya yang telah memberikan bantuan kepada penulis untuk mendapatkan buku-buku yang berkaitan dengan penelitian ini.
9. Muhammad Robbi, Muhaimin Hamid, Citra Rahmadhani, dan Muhammad Fajar selaku saudara kandung tersayang yang senantiasa memberikan semangat dan mendoakan kelancaran untuk penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini.
10. Amelia Rahmadhani, S.Pd., yang telah memberikan dukungan serta banyak membantu dalam penulisan skripsi ini.
11. Keluarga besar Prodi Ilmu Hukum angkatan 2016 yang namanya tidak dapat penulis cantumkan satu per satu dan almarhum UIN Suska Riau.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan oleh sebab itu kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua, Aamiin ya Robball'alam.

Pekanbaru, 08 Juli 2021
Penulis

MHD IRWANUL HAKIM
11627103937



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Batasan Masalah	5
C. Rumusan Masalah	5
D. Tujuan Penelitian	6
E. Manfaat Penelitian	6
F. Metode Penelitian	7
G. Sistematika Penulisan	11
BAB II GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	
A. Sejarah Singkat Berdirinya Desa Muara Uwai Kecamatan Bangkinang	13
B. Keadaan Wilayah	14
C. Pemerintahan	17
D. Visi dan Misi	18
BAB III TINJAUAN PUSTAKA	
A. Teori Peraturan Perundang – Undangan.....	20
1. Pengertian Peraturan Perundang – undangan.....	20
2. Asas Hukum Pembentukan Peraturan Perundang – undangan	24
3. Hierarki Peraturan Perundang – undangan RI	29
B. Teori Sosialisasi.....	34
1. Pengertian Sosialisasi.....	34
2. Tujuan Sosialisasi	35
C. Teori Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa	36
1. Pengertian Anggaran.....	36



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa)	38
D. Teori Pemerintah Desa	40
1. Pengertian Pemerintah Desa	40
2. Asas – asas Pemerintahan Desa	41
3. Tugas dan Kewajiban Kepala Desa.....	43
4. Badan Permusyawaratan Desa	47
E. Teori Masyarakat Desa.....	48
1. Pengertian Masyarakat Desa	48
2. Hak dan Kewajiban Masyarakat Desa	49
F. Teori Pembangunan Desa.....	51
1. Pengertian Pembangunan Desa	51
2. Aspek Pembangunan Desa.....	52

BAB IV PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Sosialisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Oleh Pemerintah Desa Muara Uwai Kepada Masyarakat Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa	53
B. Faktor Penghambat Pelaksanaan Sosialisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Oleh Pemerintah Desa Muara Uwai Kepada Masyarakat Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa	65

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	70
B. Saran	70

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR TABEL

Tabel I.1	Populasi dan Sampel	9
Tabel II.1	Luas Wilayah	14
Tabel II.2	Batas Desa	15
Tabel II.3	Daftar Jumlah Sekolah	16
Tabel II.4	Keadaan Sarana dan Prasarana Ibadah	16
Tabel IV.1	Apakah Ada Pemerintah Desa Muara Uwai Melakukan Sosialisasi Melalui Musyawarah Pelaksanaan Kegiatan Desa	59
Tabel IV.2	Apakah Ada Pemerintah Desa Muara Uwai Melakukan Musyawarah Dusun	60
Tabel IV.3	Apakah Ada Pemerintah Desa Muara Uwai Melakukan Musyawarah Kelompok.....	61
Tabel IV.4	Apakah Ada Pemerintah Desa Muara Uwai Melakukan Solialisasi Melalui Sistem Informasi Desa Berbasis Website	61
Tabel IV.5	Apakah Ada Pemerintah Desa Muara Uwai Melakukan Solialisasi Melalui Papan informasi Desa	62



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara kesatuan yang daerahnya dibagi menjadi beberapa provinsi dan kabupaten dengan bentuk dan susunan tingkatan pemerintahan terendah adalah desa atau kelurahan. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 bahwa “Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi, dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dalam undang-undang.”¹

Dalam tata pemerintahan, istilah desa tidak asing lagi bagi kita semua, desa merupakan sebagai suatu gejala yang bersifat universal terdapat dimanapun didunia ini, sebagai suatu komunitas kecil yang terikat pada lokasi tertentu baik sebagai tempat tinggal (secara menetap) maupun bagi pemenuhan kebutuhannya dan terutama yang tergantung pada sektor pertanian.²

Pemerintah desa adalah satuan pemerintahan terendah, desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat

¹ Pasal 18 ayat (1) UUD 1945 Mengartikan Bahwa “ Pemerintah Desa Sebagai Penyelenggara Urusan Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia Dibagi Atas Kabupaten Dan Kota, Yang Tiap-Tiap Provinsi, Kabupaten Dan Kota Itu Mempunyai Pemerintah Daerah, Yang Diatur Dengan Undang-Undang”.

² V. Wiratna Sujarweni, *Akuntansi Desa*, (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2013), h.1.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan.³

Pembangunan merupakan bentuk perubahan sosial yang terarah dan terencana melalui kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat. Bangsa Indonesia seperti terdapat dalam pembukaan UUD 1945 telah mencantumkan tujuan pembangunan nasionalnya. Kesejahteraan masyarakat adalah suatu keadaan yang selalu menjadi cita-cita seluruh bangsa di dunia ini. oleh karena itu, untuk mewujudkan itu semua Presiden Joko Widodo mengeluarkan program berupa Nawacita Presiden, pada bagian ketiga menyebutkan bahwa Presiden ingin membangun Indonesia dari pinggiran, dengan cara memperkuat daerah-daerah dan desa.

Pemerintah desa merupakan salah satu jenjang birokrasi yang bersentuhan langsung dengan kepentingan masyarakat, tentunya berkewajiban untuk melaksanakan program-program pembangunan desa. Sukses dan tidaknya program itu tergantung pada kinerja aparat pemerintahan desa dalam hal ini kepala desa sebagai pengambil kebijakan tertinggi. Kepala desa dalam kapasitasnya tersebut di harapkan dapat melaksanakan berbagai kebijakan baik yang berasal dari pimpinan dan kepemimpinannya (kebijakan struktural) ataupun kebijakan-kebijakan yang sifatnya teknis di tingkat desa.

Keberhasilan kepala desa dalam melaksanakan segala kebijakan yang ada merupakan salah satu indikator bahwa peran-peran birokrasi di desa telah berjalan, tentunya pelayanan kepada masyarakat akan semakin baik. Idealnya

³ Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

seorang pemimpin harus memiliki pengetahuan umum yang luas, semakin tinggi kedudukannya dalam hierarchie kepemimpinan organisasi, maka semakin banyak pula tuntutan untuk berfikir dan bertindak secara generalis.⁴

Adanya pembangunan desa, memang diajukan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa, dengan mendorong pembangunan desa untuk mengurangi kesenjangan antara desa dan kota.

Untuk itu presiden menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintah desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa dengan Badan Permusyawaratan Desa, dan ditetapkan dengan peraturan desa.⁵

Kepala Desa Muara Uwai sebagai pemimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa Muara Uwai Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar, mempunyai tugas dan wewenang untuk melaksanakan sosialisasi terhadap APB Desa kepada masyarakat yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sosialisasi sebagaimana dalam Pasal 59 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa. Menyebutkan bahwa:

1. Kepala Desa menginformasikan dokumen RKP Desa, APB Desa dan rencana kerja kepada masyarakat melalui sosialisasi kegiatan.

⁴ Hasan Alwi, dkk. *Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi ketiga*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), h. 253.

⁵ Pasal 1 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan antara lain melalui:
 - a. Musyawarah pelaksanaan kegiatan desa;
 - b. Musyawarah dusun;
 - c. Musyawarah kelompok;
 - d. Sistem informasi desa berbasis website;
 - e. Papan informasi desa; dan
 - f. Media lain sesuai kondisi desa.⁶

Berdasarkan hasil observasi penulis di Desa Muara Uwai Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar, bahwa selama ini APB Desa setelah sah menjadi peraturan desa tidak ada disosialisasikan oleh pemerintah desa kepada masyarakat. hal ini tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 yang seharusnya sosialisasi APB Desa tersebut dilakukan oleh pemerintah desa, padahal keterbukaan informasi publik sangat dibutuhkan dalam membentuk tata kelola pemerintahan desa yang baik. Oleh karena itu, penulis tertarik mengkaji lebih lanjut untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan Sosialisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Oleh Pemerintah Desa Muara Uwai Kepada Masyarakat Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa, serta faktor penghambat dari pelaksanaan sosialisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tersebut.

⁶ Pasal 59 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis mengangkat judul penelitian ini yaitu “ **PELAKSANAAN SOSIALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA OLEH PEMERINTAH DESA MUARA UWAI KEPADA MASYARAKAT BERDASARKAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 114 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN PEMBANGUNAN DESA**”

B. Batasan Masalah

Untuk menghindari pemahaman serta penafsiran yang keliru serta untuk memberikan arahan dalam penelitian ini, maka perlu kiranya penulis memberikan batasan dalam penelitian ini, yaitu hanya mengkaji tentang pelaksanaan sosialisasi APB Desa kepada oleh pemerintah desa kepada masyarakat sesuai Pasal 59 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian-uraian latar belakang tersebut di atas, maka dapat di rumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana Pelaksanaan Sosialisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Oleh Pemerintah Desa Muara Uwai Kepada Masyarakat Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa?
2. Apa Faktor Penghambat Pelaksanaan Sosialisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Oleh Pemerintah Desa Muara Uwai Kepada Masyarakat



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa?

D. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui Sosialisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Oleh Pemerintah Desa Muara Uwai Kepada Masyarakat Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa.
2. Untuk mengetahui faktor penghambat Sosialisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Oleh Pemerintah Desa Muara Uwai Kepada Masyarakat Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat secara Teoritis

- a. Untuk menambah referensi, bahan literature atau pustaka, khususnya dalam memahami pelaksanaan sosialisai APB Desa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa.
- b. Sebagai bahan pertimbangan masukan bagi penulis dari hasil penelitian ini dan juga dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi peneliti lain yang ingin meneliti lebih lanjut



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Manfaat secara Praktis

- a. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian, masukan dan sumbangan pemikiran yang diharapkan dapat bermanfaat baik bagi pemerintah desa dalam pelaksanaan sosialisasi kepada masyarakat, agar masyarakat lebih mengetahui tujuan dari penggunaan APB Desa tersebut.
- b. Syarat guna memperoleh gelar sarjana strata satu (S1) di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Fakultas Syari'ah dan Hukum.

F. Metode Penelitian

Untuk melakukan penelitian dalam rangka untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini, maka penulis menyusun metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis atau empiris yang diteliti pada awalnya adalah data sekunder, untuk kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer di lapangan, atau terhadap masyarakat.⁷ Sedangkan sifat penelitian ini adalah penelitian deskriptif yaitu penelitian yang bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi di adakan penelitian ini adalah di Desa Muara Uwai Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar, dengan topik dan

⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), h. 52.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pertimbangan mengambil lokasi ini, karena penulis melihat di Desa Muara Uwai Kecamatan Bangkinang tidak adanya pelaksanaan sosialisasi APB Desa kepada masyarakat sesuai dengan Pasal 59 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa.

3. Jenis Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data primer, data sekunder dan data tersier:

- a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung di lapangan tempat lokasi penelitian.⁸ Dalam hal ini penulis memperoleh data dari pihak-pihak dan informasi yang dibutuhkan dan relevan dengan kebutuhan penelitian.
- b. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui kajian pustaka, yang terdiri dari dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya.⁹ Yang berhubungan dengan masalah dalam penelitian ini.
- c. Data Tersier, yaitu bahan hukum yang sifatnya melengkapi kedua bahan hukum di atas, seperti kamus Hukum dan ensiklopedia yang berkaitan dengan topik yang dikaji dalam penelitian ini.

4. Populasi dan Sampel

Populasi adalah unit yang diteliti, yaitu dapat berupa himpunan orang, benda, kejadian, kasus-kasus, atau tempat dengan ciri atau sifat yang sama.¹⁰

⁸ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), h. 30.

⁹ *Ibid*, h. 31

¹⁰ Bambang, Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), h. 118.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sedangkan sampel adalah himpunan bagian atau sebagian dari populasi yang ada.¹¹ Metode yang digunakan adalah *purposive sampling* yaitu peneliti menggunakan pertimbangan sendiri secara sengaja dalam memilih anggota populasi yang dianggap dapat memberikan informasi yang diperlukan atau unit sampel yang sesuai dengan kriteria tertentu yang diinginkan oleh peneliti. Responden merupakan Kepala Desa Muara Uwai, Sekretaris Desa, Badan Permusyawaratan Desa, Kepala Dusun, Rukun Warga (RW), dan Masyarakat kisaran umur 20 tahun ke atas.

Tabel I.1
Populasi dan Sampel

No	Responden	Populasi	Sampel	Persentase
1.	Kepala Desa	1 Orang	1 Orang	100%
2.	Badan Permusyawaratan Desa (BPD)	9 Orang	4 Orang	4,4%
3.	Kepala Dusun	4 Orang	4 Orang	100%
4.	RW	8 Orang	3 Orang	3,7%
5.	Masyarakat	3,704 Orang	30 Orang	0,8%
Jumlah		3,716 Orang	42 Orang	

Sumber: Data Olahan Tahun 2021

5. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data-data yang di perlukan, dipergunakan tehnik pengumpulan data antara lain :

- a. Observasi, yaitu suatu proses melihat, mengamati dan mencermati.¹² dengan melakukan pengamatan langsung yang ada di lapangan yang erat kaitannya dengan objek penelitian.

¹¹ *Ibid*, h. 119.

¹² Haris Herdiansyah, *Metode Kualitatif untuk Ilmu-Ilmu Sosial*, (Jakarta: Salemba Hmanika, 2010), h. 106.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

- b. Wawancara, yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan antara dua orang atau lebih secara tatap muka mendengarkan langsung berbagai informasi atau keterangan lisan melalui dialog langsung antar peneliti dengan para informan.
- c. Angket, yaitu pengumpulan data dengan cara mengajukan pertanyaan tertulis untuk dijawab secara tertulis pula oleh responden.
- d. Studi kepustakaan, yaitu pengumpulan data melalui kajian buku-buku, jurnal, dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.¹³

6. Analisis Data

Analisis data adalah suatu proses untuk menafsirkan atau memaknai suatu Data yang terkumpul dianalisis secara deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif yakni data yang diperoleh kemudian dianalisis secara bersamaan dengan proses pengumpulan data dari hasil observasi dan wawancara yang diperoleh kemudian dicatat dan dikumpulkan sehingga menjadi sebuah catatan lapangan. Teknik analisis data kualitatif digunakan untuk menggambarkan secara sistematis fakta-fakta dan data-data yang di peroleh, serta hasil-hasil penelitian baik dari hasil studi lapangan maupun studi literatur. Proses analisis data dilakukan melalui tahapan identifikasi menurut kelompok tujuan penelitian, mengelola dan menginterpretasikan data, kemudian dilakukan abstraksi,

¹³ Hajar. M, *Metode Penelitian Hukum*, (Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, 2011), h. 53.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

reduksi dan memeriksa keabsahan data yang disajikan berbentuk tabel, skema, maupun dalam bentuk narasi.

G. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan proposal penelitian, penulis membagi sistematika penulisan dalam 5 (lima) bab, masing-masing bab di uraikan dalam sub-bab, sehingga antara satu bab dengan yang bab lainnya merupakan suatu sistem dan memiliki keterkaitan satu sama yang lain. Untuk lebih jelasnya, penulis akan menguraikan satu persatu masing-masing bab tersebut, yaitu :

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam Bab Ini Berisikan Uraian Tentang Tentang : Latar Belakang Masalah, Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Dan Kegunaan Penelitian, Metode Penelitian, Dan Sistematikan Penulisan.

BAB II : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Dalam Bab Ini Akan Di Uraikan Gambaran Lokasi Penelitian, Sejarah Desa Muara Uwai Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar, Visi Dan Misi Desa Muara Uwai Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar. Dan Wilayah Geografis Desa Muara Uwai Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar.

BAB III : TINJAUAN PUSTAKA

Pada Bab Ini Akan Di Uraikan Teori - teori Tentang Peraturan Perundang – undangan, Sosialisasi, Anggaran Pendapatan dan

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Belanja Desa (APBDesa), Pemerintah Desa, Masyarakat Desa, dan Pembangunan Desa.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini penulis membahas hasil penelitian. meliputi pembahasan Pelaksanaan Sosialisasi Oleh Pemerintah Desa Muara Uwai Terhadap Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Kepada Masyarakat Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa.

BAB V : PENUTUP

Pada bab ini berisi kesimpulan dan saran yang berhubungan dengan hasil penelitian.

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Singkat Berdirinya Desa Muara Uwai Kecamatan Bangkinang

Pada zaman dahulu Desa Muara Uwai terletak di dua buah sungai yakni sungai Uwai dan sungai Kampar dimana disepanjang sungai uwai terdapat sebuah kampung / dusun bernama Dusun Uwai. dan di Dusun Uwai tersebut terdapat sebuah makam seorang pejuang dimasa penjajahan Belanda bernama Gandulo Datuok Tabano yang meninggal pada 11 November 1898 sungai uwai tersebut bermuara kesungai Kampar persis di muara sungai uwai terdapat pula sebuah masjid yang tertua di Kenegerian Bangkinang yaitu bernama Masjid Jami' Kenegerian Bangkinang, masjid ini merupakan masjid satu-satunya yang berdiri pada tahun 1907.¹⁴

Dan disepanjang sungai Kampar sampai muara sungai uwai terdapat sebuah kampung / dusun diberinama Muara Uwai setelah Kenegerian Bangkinang dimekarkan menjadi enam desa yakni Bangkinang, Langgini, Pulau Lawas, Muara Uwai, Pasir Sialang, Pulau. Desa Muara Uwai pada mulanya berasal dari muara sungai uwai dan rukun kampung / Dusun Muara Uwai.

Untuk mengetahui kondisi desa dari kejadian dan persitiwa yang telah terjadi di desa Muara Uwai pada masa lalu adalah sebagai berikut:

¹⁴ Buku Profil Desa Muara Uwai tahun 2012



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Keadaan Wilayah

1. Kondisi Gografis

Desa Muara Uwai merupakan salah satu desa yang berda di kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar sekitar 55 Km dari ibu kota Provinsi Riau. Menurut data statistik dikantor kepala Desa Muara Uwai, memiliki luas wilayah 2.312 Ha. Yang terdiri dari lahan pertanian, peerkebunan, pemukiman, dan perkantoran.

Kondisi iklim yang terjadi di desa Muara Uwai sama halnya dengan iklim yang terjadi di desa-desa yang ada diwilayah Indonesia, mempunyai iklim tropis yaitu musim kemarau dan penghujan yang sangat berpengaruh langsung terhadap sistem pertanian dan perekonomian masyarakat desa Muara Uwai.

2. Kondisi Demografis

Tabel II.1
Luas Wilayah

No	Luas Wilayah	Luas Lahan
1.	Luas Desa	2.312 Ha
2.	Tanah Sawah	603 Ha
3.	Tanah Pekarangan	312 Ha
4.	Tanah Tegalan	292 Ha
5.	Lain-lain	1.105 Ha

Sumber: Kantor Desa Muara Uwai Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar Tahun 2020

Tabel II.2
Batas Desa

No	Batas	Berbatasan
1.	Utara	Kelurahan Pasir Sialang
2.	Timur	Desa Pulau Lawas
3.	Selatan	Sungai Kampar

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4.	Barat	Desa Binuang
----	-------	--------------

Sumber: Kantor Desa Muara Uwai Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar Tahun 2020

Sebelah utara berbatasan dengan Kelurahan Pasir sialang, sebelah timur berbatasan dengan desa pulau lawas, sebelah selatan berbatasan dengan Sungai Kampar, dan sebelah barat berbatasan dengan Desa Binuang Desa Muara uwai terdiri dari empat Dusun yakni:

- a. Dusun Muara uwai.
- b. Dusun uwai.
- c. Dusun Telo.
- d. Dusun Cubadak.

3. Pendidikan

Untuk meningkatkan sumber daya manusia dibutuhkan tingkan penduduk yang madani, sebab pendidikan sangat menduduk terhadap peningkatan pembangunan. Karena pendidikan adalah sesuatu yang sangat penting dan tidak bisa dilepaskan dari kehidupan manusia, karena dengan pendidikan seorang yang awalnya tidak tahu menjadi tahu, dengan pendidikan bisa berubah sifat seseorang yang awalnya kurang baik menjadi baik, bahwa maju atau tidaknya suatu negara bisa dilihat dari mutu pendidikan negara tersebut, begitulah pentingnya pendidikan bagi manusia.

Tabel II.3
Daftar Jumlah Sekolah

No	Tingkat Sekolah	Jumlah
1	PAUD	2
2	TK	1

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3	SD Negeri	3
4	SMP	-
5	MTs	1
6	SMA	-
7	MA Negeri	1
8	Pondok Pesantren (Aliyah)	1

Sumber: Kantor Desa Muara Uwai Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar Tahun 2020

4. Agama

Masyarakat desa Muara Uwai merupakan penduduk yang seluruhnya memeluk agama Islam, sarana dan prasarana yang sudah tersedia sudah cukup memadai bagi pemeluk agama islam untuk menjalankan ibadahnya dan mengajarkan ilmu agama serta membaca Al-qur'an. Untuk lebih jelasnya mengenai sarana dan prasarana yang ada di Desa Muara Uwai dilihat dari table berikut:

Tabel II.4
Keadaan Sarana dan Prasarana Ibadah

No	Sarana dan Prasarana Ibadah	Jumlah
1	Masjid	4
2	Musholla	7
Jumlah		11

Sumber: Kantor Desa Muara Uwai Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar Tahun 2020

Berdasarkan table diatas, dapat dilihat bahwa sarana dan prasarana ibadah di Desa Muara Uwai yang dimiliki berjumlah 11 unit yaitu: 4 unit Masjid dan 7 unit Musholla yang seluruhnya dalam kondisi cukup baik.

5. Sosial Budaya

Manusia dan kebudayaan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan karena, atas dasar inilah kehidupan makhluk sosial dapat berlangsung. Dan begitu juga antara manusia satu dengan yang lain juga

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tidak dapat dipisahkan karena manusia itu membutuhkan pertolongan sehingga dengan demikian timbul kehidupan bermasyarakat.

Dalam hal ini masyarakat Desa Muara Uwai juga mempunyai jiwa sosial yang tinggi dan juga mempunyai kebudayaan yang tersendiri, misalnya ziarah kubur dan masih banyak lagi. Hal ini memungkinkan di dukung oleh agama Islam dan pengaruh budaya oleh ajaran Islam.

6. Kondisi Ekonomi

Kondisi ekonomi masyarakat Desa Muara Uwai secara kasat mata terlihat jelas perbedaannya antar rumah tangga yang berkategori miskin, sedang dan kaya. Hal ini disebabkan karena mata pencahariannya di sektor-sektor usaha yang berbeda-beda pula, sebagian besar di sektor non formal seperti buruh bangunan, buruh tani, petani sawah, perkebunan karet dan sawit, sebagian kecil di sektor formal seperti PNS Pemda, Honorer, Guru, Tenaga Medis, TNI/POLRI, dll.

C. Pemerintahan

Dinas instansi yang ada di Desa Muara Uwai:

1. UPT dinas pendidikan dan olahraga.
2. Kantor balai penyeluruhan pertanian.
3. UPT dinas kesehatan.
4. Kantor pusat statistik.
5. Koordinator keluarga berencana kecamatan.
6. UPTD perikanan.
7. UPTD perkebunan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

8. UPTD pertanian.

D. Visi dan Misi

1. Visi

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan dengan melihat potensi dan kebutuhan desa. Penyusunan Visi Desa Muara uwai dilakukan dengan pendekatan partisipatif, melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan di desa seperti Pemerintah Desa, BPD, Tokoh Masyarakat, tokoh agama, lembaga masyarakat desa dan masyarakat desa pada umumnya. Pertimbangan kondisi eksternal di desa seperti satuan kerja wilayah pembangunan di Kecamatan Bangkinang Seberang mempunyai titik berat sektor pertanian. Maka berdasarkan pertimbangan di atas Visi Desa Muara uwai adalah : “Terwujudnya Desa Muara Uwai Sebagai Desa Swasembada Pangan, Yang Sejahtera, Berbudaya, Dan Agamis.

2. Misi

Selain Penyusunan Visi juga telah ditetapkan misi-misi yang memuat sesuatu pernyataan yang harus dilaksanakan oleh Desa agar tercapainya visi desa tersebut. Visi berada di atas Misi. Pernyataan Visi yang kemudian dijabarkan kedalam misi agar dapat dioperasionalkan/dikerjakan. Sebagaimana penyusunan Visi, misi pun dalam penyusunannya menggunakan pendekatan partisipatif dan pertimbangan potensi dan kebutuhan Desa Muara uwai Sebagaimana proses yang dilakukan maka misi desa Muara uwai adalah :



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Meningkatkan sarana dan prasarana pertanian.
- b. Peningkatkan pengembangan kualitas sumber daya manusia dibidang pertanian.
- c. Pembangunan sarana jalan Usaha Tani dan Peningkatan Jalan Lingkungan.
- d. Memotifasi pemilik lahan terlantar untuk dimanfaatkan.
- e. Meningkatkan pengembangan agribisnis berbasis kelompok.
- f. Perbaikan dan Peningkatan sarana pelayanan kesehatan dan umum.
- g. Memberdayakan anak dan remaja usia produktif.
- h. Meningkatkan Pengembangan ekonomi masyarakat.
- i. Menumbuh kembangkan Lembaga Adat.
- j. Memposisikan nilai adat istiadat ditengah masyarakat
- k. Menumbuh kembangkan kehidupan beragama bagi anak dan remaja, masyarakat.
- l. Mengoptimalkan fungsi Madrasah, mushollah dan masjid sebagai sarana pembinaan Akhlaqul karimah.¹⁵

¹⁵ Peraturan Desa Muara Uwai Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (Rpjmdes) Tahun 2011 – 2013

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

TINJAUAN PUSTAKA

A. Teori Peraturan Perundang – Undangan

1. Pengertian Peraturan Perundang - Undangan

Secara teoritik dalam khazanah ilmu hukum, terdapat beberapa definisi istilah mengenai “perundang - undangan “ atau kata “ peraturan perundang - undangan, jika menggunakan bahasa baku yang merujuk di dalam Undang – Undang No. 12 Tahun 2011 (UU No. 12 Tahun 2011) maka terminologi perundang – undangan lazim disebut juga dengan *wetgeving*, *gsetgebung* ataupun *legislation*. Istilah perundang – undangan (*legislation*, *wetgeving* ataupun *Gesetgebung*) dalam beberapa kepustakaan memiliki dua pengertian yang berbeda, dalam kamus umum yang berlaku, istilah *legislation* dapat diartikan dengan perundang – undangan dan pembuat undang – undang.¹⁶ Istilah *wetgeving* diterjemahkan dengan pengertian membentuk undang – undang keseluruhan daripada undang – undang negara.¹⁷ Sedangkan istilah *Gesetgebung* diterjemahkan dengan pengertian perundang – undangan.¹⁸

Pengertian *wetgeving* dalam *Juridisch wordenboek* diartikan sebagai berikut:

¹⁶ Maria Farida Indrati Soeprapto, *Ilmu Perundang – Undangan*, (Yogyakarta: Kanisius, 2007), h.3.

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ *Ibid.*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Perundang – undangan merupakan proses pembentukan atau proses membentuk peraturan negara, baik ditingkat pusat maupun ditingkat daerah.
- b. Perundang – undangan adalah segala peraturan negara, yang merupakan hasil pembentukan peraturan, baik ditingkat pusat maupun tingkat daerah.¹⁹

Maria Farida Indrati Soeprapto mengatakan bahwa:²⁰ secara istilah “ perundang – undangan “ *legislation, wetgiving, atau gesetgebung* mempunyai dua pengertian yaitu: *pertama*, perundang – undangan merupakan proses pembentukan atau proses membentuk peraturan – peraturan negara baik tingkat pusat maupun ditingkat daerah; *kedua*, perundang – undangan adalah segala peraturan yang merupakan hasil pembentukan peraturan – peraturan baik ditingkat pusat maupun ditingkat daerah. Pengertian perundang – undangan dalam konstruksi UU No. 12 Tahun 2011, merupakan sebuah aturan tertulis yang mengikat secara umum dan dibuat oleh pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang – undangan pula.²¹

Menurut Bagir Manan pengertian peraturan perundang – undangan sebagai berikut:.

¹⁹ S.J. Fockema Andreae dikutip dalam Maria Farida Indrati Soeprapto, *Ilmu perundang – Undangan*, Yogyakarta: Kanisius, 2007, h. 3.

²⁰ Maria Farida Indrati Soeprapto, *Op.Cit.*, h. 3.

²¹ Pasal 1 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Perundangan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Setiap keputusan yang tertulis yang dikeluarkan pejabat atau lingkungan jabatan yang berwenang berisi aturan tingkah laku yang bersifat atau mengikat umum.
- b. Merupakan aturan – aturan tingkah laku yang berisi ketentuan – ketentuan mengenai hak, kewajiban, fungsi, status atau suatu tatanan.
- c. Merupakan peraturan yang mempunyai ciri – ciri umum dan abstrak yang berarti tidak mengatur atau tidak ditujukan pada objek/peristiwa/gejala konkret tertentu.
- d. Dengan mengambil pemahaman dalam kepustakaan Belanda, peraturan perundang – undangan lazim disebut dengan *wet in materiele zin*, atau sering juga disebut dengan *algemeen verbindende voorscrif* yang meliputi antara lain: *de supra nationale algemeen verbindende voorscrifthen* , *wet*, *A MvB*, *de Ministeriele de gemeentelijke raadsverordeningen*, *de provinciale stater verordebingen*.²²

Peraturan perundang – undangan ini sendiri merupakan salah satu bentuk dari norma hukum. Dalam literature hukum dan perundang – undangan, secara umum terdapat tiga (3) macam norma hukum yang merupakan hasil dai proses pengambilan keputusan hukum, yaitu:

- a) keputusan normatif yang bersifat mengatur (*regeling*);
- b) keputusan normatif yang bersifat penetapan administrasi (*beschikking*);

²² Bagir Manan dikutip dalam Maria Farida Indrati Soeprapto, *Ilmu Perundang – Undangan*, Yogyakarta: Kanisius, 2007, h. 11.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c) keputusan normatif yang disebut *vonnis*. Selain ketiga bentuk produk hukum diatas, juga ada bentuk peraturan yang dinamakan “ *beleids regels* “ (*policy rules*) ini biasanya diterjemahkan kedalam Bahasa Indonesia menjadi peraturan kebijaksanaan,²³ yang sering disebut sebagai quasi peraturan.²⁴

Kemudian menurut Sajipto Raharjo, peraturan perundang – undangan memiliki ciri – ciri sebagai berikut.²⁵

- a. Bersifat umum dan komprehensif yang merupakan kebalikan dari sifat – sifat khusus dan terbatas.
- b. Bersifat universal. Artinya, dibentuk untuk menghadapi peristiwa – peristiwa yang akan datang yang belum jelas bentuk konkretnya. Oleh karena itu, tidak dapat dirumuskan untuk menghadapi peristiwa – peristiwa tertentu saja.
- c. Lazimnya bagi suatu peraturan perundang – undangan mencantumkan klausul yang memuat kemungkinan dilakukannya peninjauan kembali.

Menurut Bukhardt Krems, bahwa salah satu besar dari ilmu perundang – undangan yaitu adalah teori perundang – undangan (*Gestzgebungtheorie*) yang berorientasi pada mencari kejelasan dan kejernihan makna atau pengertian yang bersifat kognitif.²⁶ Proses kejelasan dan kejernihan makna dari suatu peraturan perundang – undangan

²³ King Faisal Sulaiman, *Teori Peraturan Perundang – Undangan dan Aspek Pengujinya*, Yogyakarta: Thafa Media, 2017, h. 7.

²⁴ Jimly Ashidiqqie, *Perihal Undang – Undang*, Jakarta: Konstitusi Press PT Syaami Cipta Media, 2006, h. 1.

²⁵ Sajipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT Citra Aditya, 2004, h. 25.

²⁶ Maria Farida Indarti Soeprapto, *Op.Cit.*, h. 8.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dipengaruhi oleh proses pembentukan peraturan perundang – undangan merupakan salah satu proses pembangunan hukum. Sebagaimana diketahui bersama bahwa pembangunan hukum yang dilaksanakan secara komprehensif mencakup substansi hukum atau disebut isi dari peraturan perundang – undangan. Oleh karena itu, agar peraturan – undangan yang dihasilkan dapat mencerminkan kualitas yang baik sebagai produk hukum.

2. Asas Hukum Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan

a. Asas Pancasila

Bangsa Indonesia telah menetapkan falsafah/asas dasar Negara adalah Pancasila yang artinya setiap tindakan/perbuatan baik tindakan pemerintah maupun perbuatan rakyat harus sesuai dengan ajaran Pancasila. Dalam bidang hukum Pancasila merupakan sumber hukum materiil, sehingga setiap isi peraturan perundang – undangan tidak boleh bertentangan dengan sila – sila yang terkandung dalam Pancasila . UUD 1945 merupakan landasan Konstitusional dari pada Negara Republik Indonesia. Perubahan UUD 1945 mengandung empat pokok – pokok pikiran yang merupakan cita – cita hukum Bangsa Indonesia yang mendasari hukum dasar negara baik hukum yang tertulis dan hukum tidak tertulis.²⁷ Pokok – pokok pikiran yang merupakan pandangan hidup bangsa adalah:

²⁷ G.J Wolhoff, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Republik Indonesia*, (Jakarta: Timun Mas, 1960), h. 9 – 10.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1) Pokok Pikiran Pertama “ *Negara* “. “ Negara melindungi segegnap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasar atas persatuan dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia “. Dari penjelasan diatas menegaskan bahwa Negara Republik Indonesia adalah Negara kesatuan yang melindungi bangsa Indonesia serta mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan demikian negara mengatasi dan menyelesaikan masalah – masalah yang menimbulkan perpecahan dalam negara, dan sebaliknya negara, pemerintah serta setiap warga negara wajib mengutamakan kepentingan negara diatas kepentingan golongan ataupun perorangan.
- 2) Pokok pikiran kedua adalah: “ Negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat “. Istilah keadilan sosial merupakan masalah yang selalu dibicarakan dan tidak pernah selesai, namun dalam bernegara semua manusia Indonesia mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam segala bidang terutama yang menyangkut hukum positif. Penciptaan keadilan sosial pada dasarnya bukan semata – mata tanggung jawab negara akan tetapi juga masyarakat, kelompok masyarakat bahkan perseorangan.
- 3) Pokok pikiran ketiga adalah: “ Negara yang berkedaulatan rakyat “ pernyataan ini menunjukkan bahwa dalam negara Indonesia yang berdaulat adalah rakyat atau kedaulatan ada ditangan rakyat. Dalam

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pelaksanaan kedaulatan rakyat ini melalui musyawarah oleh wakil – wakil rakyat.

- 4) Pokok pikiran ke empat adalah: “ Negara berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa yang adil dan beradab “. Negara menjamin adanya kebebasan beraga dan tetap memelihara kemanusiaan yang adil dan beradab.

b. Asas Pembagian Kekuasaan dalam *Check and Balances*

Pengertian pembagian kekuasaan adalah berbeda dari pemisahan kekuasaan, pemisahan kekuasaan berarti bahwa kekuasaan negara itu terpisah – pisah dalam beberapa bagian seperti dikemukakan oleh *John Locke* yaitu:

- 1) Kekuasaan Legislatif
- 2) Kekuasaan Eksekutif
- 3) Kekuasaan Federatif

Montequieu mengemukakan bahwa setiap negara terdapat 3 (tiga) jenis kekuasaan dengan istilah *Trias Politica* yaitu:

- 1) Eksekutif
- 2) Legislatif
- 3) Yudikatif

Dari ketiga kekuasaan itu masing – masing terpisah satu sama lainnya baik mengenai orangnya maupun fungsinya. Pembagian kekuasaan berarti bahwa kekuasaan itu dibagi – bagi dalam beberapa bagian, tidak dipisahkan yang dapat memungkinkan fiksi hukum dalam

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pembuatan peraturan perundang – undangan,²⁸ adanya kerjasama antara bagian – bagian itu (*Chek and Balances*).

Tujuan adanya pemisahan kekuasaan agar tindakan sewenang – wenangan dari raja dapat dihindari dan kebebasan dan hak – hak rakyat dapat terjamin. UUD 1945 setelah perubahan membagi kekuasaan negara atau membentuk lembaga – lembaga kenegaraan yang mempunyai kedudukan sederajat serta fungsi dan wewenangnya masing – masing yaitu:

- 1) Dewan Perwakilan Rakyat
- 2) Majelis Permusyawaratan Rakyat
- 3) Dewan Pimpinan Daerah
- 4) Badan Pemeriksaan Keuangan
- 5) Presiden dan Wakil Presiden
- 6) Mahkamah Agung
- 7) Mahkamah Konstitusi
- 8) Komisi Yudisial
- 9) Dan lembaga – lembaga lainnya yang kewenangannya diatur dengan undang – undang.

Dengan demikian UUD 1945 tidak menganut pemisahan kekuasaan negara seperti dikemukakan oleh *John Locke* dan *Montesquieu* seperti tersebut diatas, akan tetapi UUD 1945 membagi kekuasaan negara dalam lembaga – lembaga tinggi negara dan

²⁸ G.J Wolhoff, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, h. 10.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengatur pula hubungan timbal balik antar lembaga tinggi negara tersebut.²⁹

Sedangkan disisi yang lain, teori perundang – undangan mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam pembuatan peraturan perundang – undangan, Purnadi Purbacaraka dan Prof. Soerjono Soekanto,³⁰ memperkenalkan asas hukum dalam perundang – undangan yakni sebagai berikut:

- 1) Peraturan perundang – undangan tidak berlaku surut (*non retroaktif*);
- 2) Peraturan perundang – undangan yang dibuat oleh penguasa yang lebih tinggi, mempunyai kedudukan yang lebih tinggi pula (sistem hierarki);
- 3) Peraturan perundang – undangan bersifat khusus mengenyampingkan peraturan perundang – undangan bersifat umum (*lex specialis derogate lex generalis*);
- 4) Peraturan perundang – undangan yang berlaku belakangan membatalkan peraturan perundang – undangan yang berlaku terdahulu (*lex posteriori derogate lex periori*);³¹

²⁹ G.J Wolhoff, *Ibid*.

³⁰ Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, *Peraturan Perundang – Undangan dan Yurisprudensi*, (Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, Cet ke – 3, 1989), h. 7 – 11.

³¹ Munir Fuady, *Teori Negara hukum Modern*, (Bandung, PT. Refika Aditama, 2009), h. 82 – 83.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 5) Peraturan perundang – undangan³² tidak dapat diganggu gugat;³³
- 6) Peraturan perundang – undangan sebagai sarana untuk semaksimal mungkin dapat mencapai kesejahteraan spiritual dan materil bagi masyarakat maupun individu, melalui pembaharuan atau pelestarian (*asas welvaarstaat*).³⁴

Berdasarkan asas – asas tersebut diatas, dapat dijelaskan bahwa dalam penyusunan peraturan perundang – undangan mengendepankan minimal empat asas dari asas – asas diatas.

3. Hierarki Peraturan Perundang – Undang RI

Menurut sistem hukum Indonesia, peraturan perundang – undangan (hukum tertulis) disusun dalam suatu tingkatan yang disebut hierarki peraturan perundang – undangan. Didalam memorandum DPR – GR tertanggal 9 Juni 1996 yang telah dikukuhkan oleh MPRS dengan ketetapan MPRS No. XX/MPRS/1996 dan juga oleh MPR dengan ketetapan MPR No. V/MPR/1973, Lampiran II tentang “ Tata Urutan Peraturan Perundang – undangan Republik Indonesia menurut UUD 1945 “ dalam huruf A, disebutkan tata urutan bentuk – bentuk peraturan perundang – undangan Republik Indonesi adalah sebagai berikut:

³² Ranga Widjaja, Pengantar Ilmu Perundang – Undangan, (Bandung, CV. Mandar Maju, 1998), h. 34.

³³ Paham bahwa undang – undang tidak dapat diganggu gugat tetap diikuti dalam sistem hukum Indonesia hingga saat ini, yang menyatakan bahwa sebuah undang – undang yang telah dibuat sesuai prosedur, yakni oleh DPR dan Presiden, kemudian disahkan oleh Presiden maka sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku, undang – undang tersebut tidak dapat diganggu gugat. Hanya Mahkamah Konstitusi merupakan pihak yang berwenang untuk menyatakan suatu pertauran perundang – undangan adalah tidak sah, ketentuan ini diatur dalam Pasal 24 ayat (1) Perubahan Kedua UUD 1945, yang menyataka n bahwa mahkamah konstitusi yang berwenang untuk menguji suatu undang – undang.

³⁴ Soerjono Soekanto, *Faktor – faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), h. 56 – 57.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hierarki Perundang – undangan Menurut TAP MPRS No.

XX/MPRS/1968

1. UUD 1945;
2. Ketetapan MPRS/MPR;
3. UU/Perppu;
4. Peraturan Pemerintah;
5. Keputusan Presiden;
6. Peraturan – peraturan pelaksanaan lainnya; seperti:
 - a) Peraturan Menteri;
 - b) Instruksi Menteri; dan lain – lainnya.

Tata urutan diatas menunjukkan tingkat – tingkat daripada masing – masing bentuk yang bersangkutan dimana yang disebut lebih dahulu mempunyai kedudukan lebih tinggi daripada bentuk – bentuk yang tersebut belakangnya (dibawahnya). Di samping itu, tata urutan diatas mengandung konsekuensi hukum bentuk peraturan atau ketetapan yng tingkatnya lebih rendah tidak boleh mengandung materi yang bertentangan dengan materi yang dimuat didalam suatu peraturan yang bentuknya lebih tinggi, terlepas dari soal siapakah yang berwenang memberikan penilaian terhadap materi peraturann serta bagaimana nanti konsekuansinya apabila suatu peraturan itu materinya dinilai bertentangan dengan materi peraturan yang lebih tinggi.³⁵

³⁵ Ni'matul Huda, *Negara Hukum, Demokrasi dan Judicial Review*, (UII Press, Yogyakarta, 2005).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Melalui sidang Tahunan MPR RI tanggal 7 – 18 Agustus 2000, MPR telah mengeluarkan ketetapan MPR No. III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan atau Tata Urutan Peraturan Perundang – undangan. Menurut Ktetapan MPR No. III/MPR/2000, peraturan perundang – undangan yang tersusun secara hierarkis tersebut mengandung konsekuensi bahwa suatu peraturan perundang – undangan yang lebih rendah tingkatnya tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang – undangan yang lebih tinggi tingkatnya. Hal ini selaras dengan asas hukum *lex superior deroga inferiori* (hukum yang lebih tinggi mengalahkan hukum yang tingkatannya dibawahnya). Hal ini dimaksudkan agar tercipta kepastian hukum dalam sistem peraturan perundang – undangan.

Ajaran tentang urutan peraturan perundang – undangan demikian mengandung beberapa prinsip:³⁶

- a. Peraturan perundang – undangan yang lebih tinggi kedudukannya dapat dijadikan landasan atau dasar hukum bagi peraturan perundang – undangan yang lebih rendah atau berada dibawahnya.
- b. Perauran perundang – undangan tingkat lebih rendah harus bersumber atau memiliki dasar hukum dari suatu peraturan perundang – undangan tingkat diatasnya.
- c. Isi atau muatan peraturan perundang – undangan yang lebih rendah tidak boleh menyimpangi atau bertentangan dengan peraturan perundang – undangan yang lebih tinggi tingkatnya.

³⁶ Bagir Manan, *Teori dan Politik Konstitusi*, Cetakan Kedua, (FH UII Press, Yogyakarta, 2004), h. 133.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Suatu peraturan perundang – undangan hanya dapat dicabut atau diganti atau diubah dengan peraturan perundang – undangan yang lebih tinggi atau paling tidak dengan yang sederajat.
- e. Peraturan perundang – undangan yang sejenis apabila mengatur materi yang sama, maka peraturan yang terbaru harus diberlakukan, walaupun tidak dengan secara tegas dinyatakan bahwa peraturan yang lama itu dicabut. Selain itu, peraturan yang mengatur materi yang lebih khusus harus diutamakan dari peraturan perundang – undangan yang lebih umum.

Pada tanggal 24 Mei 2004 telah menyetujui Rancangan Undang – undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan menjadi Undang (UU no, 10 Tahun 2004). Undang – undang ini menegaskan bahwa Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum negara. UUD 1945 merupakan hukum dasar dalam peraturan perundang – undangan. Mengenai jenis dan hierarki peraturan perundang – undangan diatur dalam Pasal 7 UU tersebut adalah sebagai berikut:

Hierarki Menurut UU No. 10 Tahun 2004

- a. UUD Negara RI tahun 1945;
- b. Undang – undang/Perpu;
- c. Peraturan Pemerintah;
- d. Peraturan Presiden;
- e. Peraturan Daerah;



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1) Perda Provinsi;
- 2) Perda kabupaten/Kota;
- 3) Perdes/Peraturan yang setingkat.

Jenis peraturan perundang – undangan selain yang telah disebutkan diatas, diakui keberadaanya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang – undangan yang lebih tinggi, antara lain: peraturan yang dikeluarkan oleh MPR dan DPR, DPD, MA, MK, BPK, Bank Indonesia, Menteri, Kepala Badan, Lembaga atau Komisi yang setingkat atau yang dibentuk oleh undang – undang atau pemerintah atas perintah undang – undang, DPRD Provinsi, Gubernur, DPRD Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat.

Hierarki atau tata urutan peraturan perundang – undangan di Indonesia merujuk pada Pasal 7 ayat (1) Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan (“ UU 12/2011 “) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan (“ UU 15/2019 “) yang berbunyi:

Jenis dan hierarki Peraturan Perundang – Undangan terdiri atas:

- a. UUD 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Undang – Undang/Peraturan Pengganti Undang – Undang;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah Provinsi;
- dan
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Kekuatan hukum peraturan perundang – undangan diatas sesuai dengan hierarki tersebut dan peraturan perundang – undangan yan lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang – undangan yang lebih tinggi.³⁷

B. Teori Sosialisasi**1. Pengertian Sosialisasi**

Sosialisasi adalah suatu usaha untuk memberikan informasi tentang suatu kabar atau berita. Sosialisasi juga dapat disebut sebagai promosi. Promosi terjadi karena ada juga yang harus disampaikan, terjadinya sosialisasi membuat tersebar nya suatu informasi yang tidak diketahui oleh masyarakat bnyak dan terjadinya informasi membuat terjalin nya hubungan antara penyampaian pesan dan penerima pesan. Sosialisasi program adalaah proses mengkomunikasikan program-program perusahaan kepada mssyarakat dengan tujuan untuk memberikan pengenalan dan pengha yatan dalam lingkungan tertentu.³⁸

Sosialisasi merupakan proses seseorang memperoleh pengetahuan, keterampilan dan sikap yang diperlakukannya agar dapat berfungsi sebagai

³⁷ Pasal 7 ayat (2) UU No. 12 Tahun 2011 dan Penjelasannya

³⁸ Widjaja, pengantar ilmu komunikasi,(jakarta, rieneka cipta.2008), h. 31.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

orang dewasa dan sekaligus sebagai pemeran aktif dalam suatu kedudukan atau peranan tertentu di masyarakat.³⁹ Sosialisasi merupakan salah satu cara untuk melakukan pengendalian sosial (*sosial control*) apabila suatu masyarakat ingin berfungsi efektif, maka para anggota masyarakat harus berperilaku sesuai dengan nilai dan norma sosial yang mengatur pola hidup dalam masyarakat tersebut. Dalam sosialisasi yakni individu-individu menjadi anggota masyarakat dikendalikan sehingga tidak melakukan perilaku menyimpang. Sosialisasi adalah membentuk kebiasaan, keinginan dan adat istiadat.⁴⁰

2. Tujuan Sosialisasi

Adapun tujuan dari dilaksanakannya sosialisasi dalam masyarakat antara lain:

- a. Mengetahui lingkungan sosial budaya baik lingkungan sosial tempat individu bertempat tinggal termasuk juga dilingkungan sosial yang baru agar terbiasa dengan nilai-nilai dan norma-norma sosial yang ada pada masyarakat.
- b. Membantu pengendalian fungsi-fungsi organik yang dipelajari melalui latihan-latihan mawas diri yang tepat.
- c. Menambah kemampuan berkomunikasi secara efektif dan efisien serta mengembangkan kemampuannya seperti membaca, menulis, berkreasi dan lain-lain.

³⁹ www.Artikelmateri.Com/2015/12/Sosialisasi-Adalah-Pengertian-Tujuan-Fungsi-Jenis-Pola-Agen.Html?M=1 (Diakses 29 April 2021)

⁴⁰ Syahril Syarbaini Rusdiyanta, *Dasar-Dasar Sosiologi*, Edisi Pertama, Cetakan Pertama, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009), h. 95.



C. Teori Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

1. Pengertian Anggaran

Anggaran menurut Rufus Wixon dalam Burhanuddin (1999) didefinisikan sebagai “ suatu rencana yang disajikan secara kuantitatif yang dinyatakan dalam satuan uang yang disusun untuk periode yang akan datang “. Sementara Syamsi dalam Basri (2003) mendefinisikan “ anggaran adalah hasil perencanaan yang berkaitan dengan berbagai macam kegiatan secara terpadu yang dinyatakan dalam satuan uang dalam jangka waktu tertentu “.

Dalam penyusunan anggaran menurut Rinsu (2003), ada beberapa prinsip dasar yang harus diakomodir, yaitu:

a. Transparan

Anggaran hendaknya dapat memberikan informasi tentang tujuan , sasaran, hasil dan manfaat yang diperoleh masyarakat dari suatu kegiatan atau proyek yang dianggarkan. Oleh karena itu, dalam setiap proses penganggaran harus dilakukan secara transparan.

b. Partisipatif

Masyarakat harus dilibatkan dalam setiap proses penganggaran, demi menjamin adanya kesesuaian antara kebutuhan dan aspirasi masyarakat dengan peruntukan anggaran. Selain itu juga untuk memainkan peran kontrol masyarakat sehingga dapat mencegah dan menemukan praktek korupsi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. Disiplin

Penyusunan anggaran harus berorientasi pada kebutuhan masyarakat, tanpa harus meninggalkan keseimbangan antara pembiayaan penyelenggaraan pemerintah, pembangunan dan pelayanan masyarakat. Disiplin penting untuk mencegah terjadinya pencampuran dan duplikasi anggaran disamping juga berkaitan dengan ketepatan waktu dalam pengimplementasian untuk menghindari kebocoran maupun pemborosan.

d. Keadilan

Pembiayaan pemerintah dilakukan melalui mekanisme pajak dan retribusi yang disebarkan kepada segenap lapisan masyarakat. Oleh karena itu pemerintah wajib mengalokasikan penggunaannya secara adil sehingga bisa dinikmati oleh seluruh masyarakat tanpa diskriminasi dalam pemberian pelayanan.

e. Efisiensi dan Efektivitas

Dana yang tersedia harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk menghasilkan peningkatan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat secara maksimal. Untuk itu dalam perencanaan perlu ditetapkan secara jelas, sasaran, hasil, dan manfaat yang akan diperoleh masyarakat dari setiap proyek yang diprogramkan

f. Rasional dan Terukur

dalam menyusun anggaran baik menyangkut sisi pendapatan maupun pengeluaran harus memperhatikan aspek rasionalitas anggaran dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dapat diukur sebagaimana ditentukan dalam pasal 10 Peraturan Pemerintah No. 105 Tahun 2000, yaitu (1). Jumlah pendapatan yang dianggarkan merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan; (2). Jumlah belanja yang dianggarkan merupakan batas tertinggi untuk setiap jenis belanja.⁴¹

2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa)

Secara umum, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) adalah rencana keuangan tahunan Pemerinyah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, dan ditetapkan dengan peraturan desa. Menurut Sumpeno APBDes merupakan suatu rencana tahunan keuangan desa yang ditetapkan berdasarkan peraturan desa yang mengandung prakiraan sumber pendaptan dan belanja desa untuk mendukung kebutuhan program pembangunan desa yang bersangkutan. Salah satu sumber pendapatan desa adalah dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang sudah dianggarkan setiap tahunnya 10% dari APBD. Sehingga untuk meningkatkan pemberdayaan, kesejahteraan, dan pemerataan pembangunan di pedesaan melalui APBD Kabupaten, Provinsi, dan Pemerintah, maka perlu direalisasikan dalam APBD setiap tahunnya sebesar 10% untuk ADD.

APBDesa pada dasarnya adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa, APBDesa terdiri atas:

⁴¹ Slamet Joko Utomo, “ Implementasi Kebijakan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes) Untuk Meningkatkan Pembangunan “, dalam Media Trend, Vol. 10, No. 1, Maret 2015 (Madura: Universitas Trunojoyo), h. 24-25.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Pendapatan Desa

Meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Pendapatan desa diklasifikasikan menurut kelompok dan jenis.

b. Belanja Desa

Meliputi Semua Pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa. Belanja Desa dipergunakan dalam rangka mendanai penyelenggaraan kewenangan desa dan diklasifikasikan menurut kelompok, kegiatan, dan jenis.

c. Pembiayaan Desa

Meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan desa terdiri atas penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan yang diklasifikasikan menurut kelompok dan jenis.⁴²

⁴² Yuni Lestari, Skripsi: “ Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes) DiDesa Duwet Kecamatan Bendok Kabupaten Magetan Tahun 2015 Dan Tahun 2016 “ (Ponorogo: UMP, 2018), h. 28-29.

D. Teori Pemerintah Desa

1. Pengertian Pemerintah Desa

Pasal (1) ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa:

“Pemerintah desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia ”

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa:

“Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Desa “⁴³

Pasal 1 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Kekayaan Desa:

“Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia “

Pasal 1 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Kekayaan Desa:

“ Pemerintah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Kepala Desa dan perangkat desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Desa “⁴⁴

⁴³ Pasal 1 Ayat (2) & Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penyelenggaraan pemerintahan desa dilakukan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), organisasi pemerintahan desa yang terdiri atas:

- a. Unsur pimpinan, yaitu Kepala Desa;
- b. Unsur pembantu Kepala Desa yang terdiri atas:
 - 1) Sekretaris Desa, yaitu unsur staf atau pelayanan yang diketuai oleh Sekretaris Desa;
 - 2) Unsur pelaksana Teknis, yaitu unsur pembantu Kepala Desa yang melaksanakan urusan teknis di lapangan seperti urusan pengairan, keagamaan, dan lain-lain.
 - 3) Unsur kewilayahan, yaitu pembantu Kepala Desa diwilayah kerjanya seperti Kepala Dusun.⁴⁵

2. Asas – Asas Pemerintahan Desa

Penyelenggaraan pemerintahan desa yang baik harus sejalan dengan asas pengaturan desa sebagaimana telah diamanatkan oleh Undang – Undang Nomor Tahun 2014 Tentang Desa, antara lain kepastian hukum, tertib penyelenggaraan pemerintah, tertib kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi, kearifan lokal, keberagaman serta partisipasi. Dalam melaksanakan pembangunan desa diutamakan nilai kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan perdamaian dan keadilan sosial.

⁴⁴ Pasal 1 Ayat (5) & Pasal 1 Ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Kekayaan Desa.

⁴⁵ Hanif Nurcholis, *Pertumbuhan & Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, Erlangga, Jakarta, 2011, h. 73.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Secara garis besar penjelasan asas penyelenggaraan pemerintahan desa adalah sebagai berikut:⁴⁶

- a. Kepastian hukum adalah asas didalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang – undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan desa.
- b. Tertib penyelenggaraan pemerintahan desa adalah asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan pemerintahan desa.
- c. Tertib kepentingan umum adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif.
- d. Keterbukaan adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan pemerintahan desa dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang – undangan.
- e. Proporsionalitas adalah asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggaraan pemerintahan desa.
- f. Profesionalitas adalah asas yang mengutamakan keahlian berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang – undangan.
- g. Akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir penyelenggaraan pemerintahan desa harus dapat

⁴⁶ Joko Purnomo, *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, Yogyakarta, Infest, 2016, h. 11.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.

- h. Efektifitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan yang dilaksanakan harus berhasil mencapai tujuan yang diinginkan masyarakat desa. Efisiensi adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan yang dilaksanakan harus tepat sesuai dengan rencana dan tujuan.
- i. Kearifan lokal adalah asas yang menegaskan bahwa didalam penetapan kebijakan harus memperhatikan kepentingan dan kebutuhan masyarakat.
- j. Keberagaman adalah penyelenggaraan pemerintahan desa yang tidak boleh mendiskriminasi kelompok dan masyarakat tertentu.
- k. Partisipatif adalah penyelenggaraan pemerintahan desa yang mengikutsertakan kelembagaan desa dan unsur masyarakat desa.

3. Tugas dan Kewajiban Kepala Desa

Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan pemerintahan desa, pembangunan desa, dan kemasyarakatan desa. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Desa mempunyai wewenang;⁴⁷

- a. Memimpin Penyelenggaraan Pemerintah Desa;
- b. Mengangkat dan memberhentikan Perangkat Desa;
- c. Memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa;
- d. Menetapkan Peraturan Desa;

⁴⁷Hanif Nurcholis, *Op.Cit.*, h. 74.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- e. Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- f. Membina kehidupan masyarakat Desa;
- g. Membina ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa;
- h. Membina dan meningkatkan perekonomian Desa;
- i. Mengembangkan sumber pendapatan Desa;
- j. Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
- k. Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa;
- l. Memanfaatkan teknologi tepat guna;
- m. Mengoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif;
- n. Mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- o. Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁴⁸

Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya Kepala Desa mempunyai kewajiban;

- a. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhineka Tunggal Ika;
- b. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;

⁴⁸ *Ibid*, h. 74-75.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat;
- d. Menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan;
- e. Melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender;
- f. Melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme;
- g. Menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di Desa;
- h. Menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik;
- i. Mengelola Keuangan dan Aset Desa;
- j. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa;
- k. Menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa;
- l. Mengembangkan perekonomian masyarakat Desa;
- m. Membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat Desa;
- n. Memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di Desa;
- o. Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup; dan
- p. Memberikan informasi kepada masyarakat Desa.⁴⁹

Tugas dan kewajiban Kepala Desa dalam memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa diatur lebih lanjut dengan peraturan daerah berdasarkan peraturan pemerintah. Agar fokus pada pelayanan kepada masyarakat, Kepala Desa dilarang;

⁴⁹ *Ibid*, h. 75-76.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Merugikan kepentingan umum;
- b. Membuat keputusan yang keputusan yang menguntungkan kepentingan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain dan golongan tertentu;
- c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan kewajibannya;
- d. Melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan golongan masyarakat tertentu;
- e. Melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;
- f. Melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- g. Menjadi pengurus partai politik;
- h. Menjadi anggota dan pengurus organisasi terlarang
- i. Merangkap jabatan sebagai ketua dan anggota Badan Permuyawaratan Desa, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten atau Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;
- j. Ikut serta dan terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah;
- k. Melanggar sumpah atau janji jabatan; dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Meninggalkan tugas selama 30 (tiga puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.⁵⁰

4. Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melakukan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. Badan Permusyawaratan Desa merupakan badan permusyawaratan di tingkat desa yang turut membahas dan menyepakati berbagai kebijakan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Dalam upaya meningkatkan kinerja kelembagaan di tingkat desa, memperkuat kebersamaan, serta meningkatkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat, Pemerintah Desa atau Badan Permusyawaratan Desa memfasilitasi penyelenggaraan Musyawarah Desa. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah forum musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk memusyawarahkan dan menyepakati hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Hasil musyawarah desa dalam bentuk kesepakatan yang dituangkan dalam keputusan hasil musyawarah dijadikan dasar oleh Badan Permusyawaratan Desa dan Pemerintah Desa dalam menetapkan kebijakan Pemerintahan Desa.⁵¹

⁵⁰ *Ibidi*, h. 77.

⁵¹ Penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Desa. jadi, dalam menyelenggarakan Pemerintahan Desa dan BPD. Pemerintahan Desa berfungsi menyelenggarakan kebijakan pemerintahan, sedangkan BPD berfungsi menetapkan peraturan desa bersama Kela Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Atas fungsi tersebut BPD mempunyai wewenang;

- a. Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
- b. Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

E. Teori Masyarakat Desa**1. Pengertian Masyarakat Desa**

Masyarakat desa adalah sekelompok orang yang membentuk sebuah sistem semi tertutup atau semi terbuka, dimana sebagian besar intraksi adalah individu – individu yang berbeda dalam kelompok tersebut. Semua ilmu sosial mempelajari manusia sebagai anggota kelompok. Timbulnya kelompok – kelompok itu ialah karena dua sifat manusia yang bertentangan satu sama lain, disatu piha dia ingin kerja sama, dipihak lain dia cenderung untuk bersaing dengan sesama manusia.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Hak dan Kewajiban Masyarakat Desa

Masyarakat desa memiliki hak dan kewajiban, ruang lingkup pengaturan hak masyarakat desa dalam Undang – undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 68 ayat (1), yakni:⁵²

- a. Meminta dan mendapatkan informasi dari Pemerintah Desa serta mengawasi kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
- b. Memperoleh pelayanan yang sama dan adil;
- c. Menyampaikan aspirasi, saran, dan pendapat lisan atau tertulis secara bertanggung jawab tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa;
- d. Memilih, dipilih, dan/atau ditetapkan menjadi:
 - 1) Kepala Desa;
 - 2) perangkat Desa;
 - 3) anggota Badan Permusyawaratan Desa; atau
 - 4) anggota lembaga kemasyarakatan Desa.
- e. mendapatkan pengayoman dan perlindungan dari gangguan ketentraman dan ketertiban di Desa.

Pengaturan hak dan kewajiban masyarakat desa ini memperkuat peran masyarakat desa sebagai subjek pembangunan di wilayahnya sendiri, sehingga diharapkan pengaturan ini membuka ruang bagi masyarakat

⁵² Undang – undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pasal 68 ayat 1.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

untuk bersifat aktif dalam pembangunan di wilayahnya. Pengaturan ini juga akan membangun kesetaraan dalam memperoleh pelayanan dan hak politik.

Kewajiban masyarakat desa selanjutnya disebutkan dalam pasal 68 ayat (2) Undang – undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa, yakni:⁵³

- a. Membangun diri dan memelihara lingkungan Desa;
- b. Mendorong terciptanya kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa yang baik;
- c. Mendorong terciptanya situasi yang aman, nyaman, dan tentram di Desa;
- d. Memelihara dan mengembangkan nilai permusyawaratan, permufakatan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan di Desa;
- e. Berpartisipasi dalam berbagai kegiatan di Desa.

Masyarakat desa juga merupakan warga negara Indonesia yang memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan masyarakat lain. Hak warga negara Indonesia terhadap negara telah diatur dalam Undang – Undang Dasar 1945 dan antara hukum lainnya yang sebagai penjabaran UUD 1945. Hak – hak warga negara Indonesia yang diperoleh dari negara seperti hak untuk hidup secara layak, dan aman, pelayanan, dan hal lain yang diatur dalam Undang – Undang. Sementara itu, kewajiban terhadap negara selain kewajiban terhadap masyarakat secara keseluruhan dalam

⁵³ *Ibid*, Pasal 68 ayat 2.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, juga ada kewajiban yang ditetapkan dengan Undang – Undang, seperti kewajiban untuk membela negara, dan kewajiban untuk menaati peraturan perundang – undangan yang berlaku.

F. Teori Pembangunan Desa

1. Pengertian Pembangunan Desa

Pembangunan pedesaan dalam arti luas mencakup berbagai bidang kehidupan seperti ekonomi, sosial, budaya, politik dan keamanan yang menintegritaskan peran pemerintah dan masyarakat dalam pengelolaannya dengan memanfaatkan sumberdaya pembangunan secara efektif guna peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat secara berkesinambungan. Pembangunan desa juga dapat dipandang sebagai suatu strategi yang dirancang untuk meningkatkan kehidupan sosial ekonomi masyarakat tertentu.⁵⁴ Pembangunan desa juga dipandang sebagai suatu program pembangunan yang dilakukan secara berencana untuk meningkatkan produksi, pendapatan, dan kesejahteraan dalam arti peningkatan kualitas hidup dibidang pendidikan, kesehatan dan perumahan.⁵⁵

Dengan demikian, pembangunan desa sesungguhnya merupakan upaya-upaya sadar dari masyarakat dan pemerintah baik dengan menggunakan sumber daya yang bersumber dari desa, bantuan pemerintah maupun bantuan organisasi-organisasi untuk menciptakan perubahan-

⁵⁴ Ginandjar Kartasasmita, *Pembangunan Untuk Rakyat*, (Jakarta: PT. Pustaka Cidesindo, 1996), h. 392.

⁵⁵ *Ibid*, h. 393

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perubahan kearah yang lebih baik. Di dalam Pembangunan Desa terdapat dua aspek penting yang menjadi objek pembangunan.

2. Aspek Pembangunan Desa

Secara umum, pembangunan desa memiliki dua aspek utama yaitu.⁵⁶

- a. Pembangunan Desa dalam aspek fisik, yaitu pembangunan yang objek utamanya dalam aspek fisik (sarana, prasaran dan manusia) dipedesaan seperti jalan Desa, bangunan rumah, pemukiman, jembatan, bendungan, irigasi, sarana ibadah, pendidikan dan lain sebagainya.
- b. Pembangunan dalam aspek pemberdayaan insan, yaitu pembangunan yang objek utamanya aspek pembangunan dan peningkatan kemampuan, skill dan memberdayakan masyarakat di daerah pedesaan sebagai Warga Negara, seperti pendidikan dan pelatihan, pembinaan usaha ekonomi, sosialisasi kegiatan, kesehatan spiritual dan lain sebagainya.

⁵⁶ Rihardjo Adisasmita, *Pembangunan Pedesaan*, (Yogyakarta, Graha Ilmu, 2013), h.17.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang penulis lakukan maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Sosialisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa oleh Pemerintah Desa Muara Uwai kepada masyarakat berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa tidak terlaksana dengan baik sebagaimana diatur pada Pasal 59 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa
2. Faktor-Faktor Penghambat dalam pelaksanaan sosialisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa oleh Pemerintah Desa Muara Uwai kepada masyarakat berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa adalah diantaranya; (i) kurangnya ketanggapan Pemerintah Desa; (ii) serta kondisi Desa yang belum memadai.

B. Saran

Untuk terlaksananya sosialisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa oleh Pemerintah Desa Muara Uwai kepada masyarakat berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pedoman Pembangunan Desa, maka setelah melakukan penelitian penulis mencoba memberikan beberapa saran yaitu :

1. Pemerintah Desa Muara Uwai diharapkan agar lebih tanggap lagi dalam menjalankan sosialisasi terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa
2. Pemerintah Desa Muara Uwai kedepannya diharapkan mampu membuat sistem informasi desa berbasis website, agar bisa memudahkan masyarakat dalam pengurusan administrasi maupun mendapatkan informasi berkaitan dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Adisasmita, Rihardjo. (2013). *Pembangunan Pedesaan*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Amiruddin dan Zainal Asikin. (2008). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo
- Alwi, Hasan. (2005). *Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi ketiga*. Jakarta: Balai Pustaka
- Faisal Sulaiman, king. (2017). *Teori Peraturan Perundang – Undangan dan Aspek Pengujinya*. Yogyakarta: Thafa Media
- Fuady, Munir. (2009). *Teori Negara Hukum Modern*. Bandung: PT. Refika Aditama
- Hajar. M. (2011) *Metodologi Penelitian Hukum*. Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau
- Herdiansyah, Haris. (2010). *Metodologi Kualitatif Untuk Ilmu – Ilmu Sosial*. Jakarta: Salemba Humanika
- Huda, Ni'matul. (2005). *Negara Hukum, Demikrasi dan Judicial Review*. Yogyakarta: UII Press
- Indarti Soeprapto, Maria Farida. (2007). *Ilmu Perundang – Perundangan*. Yogyakarta: Kanisius
- Kartasasmita, Ginadjar. (1996). *Pembangunan Untuk Rakyat*. Jakarta: PT. Pustaka Cidesindo
- Nurcholis, Hanif. (2011). *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintah Desa*. Jakarta: Erlangga
- Purbacara, Purnadi dan Soerjono Soekanto. (1989). *Peraturan Perundang – Undangan dan Yurisprudensi cet ke – 3*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti
- Purnomo, Joko. (2016). *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Yogyakarta: Infest
- Raharjo, Sajipto. (2004). *Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya
- Soekanto, Soerjono. (1986). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press



- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Soekanto, Soerjono. (2007). *Faktor – faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada

Sunggono, Bambang. (2007). *Metodologi Penelitian Hukum*. Yogyakarta: FH UII Press

Sujarweni, Wiratna. (2013). *Akuntansi Desa*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press

Syarbaini Rusidanta, Syahrial. (2009). *Dasar – dasar Sosiologi edisi pertama*. Yogyakarta: Graha Ilmu

Widjaja. (2008). *Pengantar Ilmu Komunikasi*. Jakarta: Rieneka Cipta

Wolhoff, G.J. (1960). *Pengantar Hukum Tata Negara Republik Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman
Pengurusan, Pertanggung jawaban Dan Pengawasan Keuangan Daerah
Derta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja
Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah Dan
PenyusunanPerhitungan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah

Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 6 Tahun 2007 Tentang Pedoman
Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Desa.

UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang –
Perundangan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Peraturan Desa Muara Uwai Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (Rpjmdes) Tahun 2011 – 2013

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa.

C. Jurnal

Slamet Joko Utomo, 2015, *Implementasi Kebijakan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes) Untuk Meningkatkan Pembangunan.* Jurnal Ekonomi Pembangunan. 10 (1) : 24-25.

D. Skripsi

Yuni Lestari, Skripsi: *Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes) Di Desa Duwet Kecamatan Bendok Kabupaten Magetan Tahun 2015 Dan Tahun 2016,* (Ponorogo: Universitas Muhammadiyah Ponorogo, 2018)

E. Artikel

Lasminingsih. 2004. *Manajemen Keuangan Daerah.* <http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/20732/2/Reference.pdf>, (Diakses tanggal 29 April 2021)

[www.Artikelmateri.Com/2015/12/Sosialisasi-Adalah-Pengertian-Tujuan-Fungsi-Jenis- Pola-Agen.Html?M=1](http://www.Artikelmateri.Com/2015/12/Sosialisasi-Adalah-Pengertian-Tujuan-Fungsi-Jenis-Pola-Agen.Html?M=1) (Diakses 29 April 2021)



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LAMPIRAN

DRAFT WAWANCARA

1. Apakah ada Pemerintah Desa Muara Uwai melakukan Sosialisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Kepada Masyarakat? (Kepala Desa)
2. Melalui apa Sosialisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa dilakukan Oleh Pemerintah Desa Muara Uwai Kepada Masyarakat? (Kepala Desa)
3. Bagaimana proses Sosialisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Oleh Pemerintah Desa Muara Uwai Kepada Masyarakat melalui Musyawarah pelaksanaan kegiatan desa? (BPD)
4. Bagaimana proses Sosialisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Oleh Pemerintah Desa Muara Uwai Kepada Masyarakat melalui Musyawarah dusun? (Kepala Dusun)
5. Bagaimana proses Sosialisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Oleh Pemerintah Desa Muara Uwai Kepada Masyarakat melalui Musyawarah kelompok? (RW)
6. Bagaimana proses Sosialisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Oleh Pemerintah Desa Muara Uwai Kepada Masyarakat melalui Sistem informasi desa berbasis website? (Kepala Dusun)
7. Bagaimana proses Sosialisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Oleh Pemerintah Desa Muara Uwai Kepada Masyarakat melalui Papan informasi desa? (RW)
8. Apakah ada proses Sosialisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Oleh Pemerintah Desa Muara Uwai Kepada Masyarakat melalui Media lain sesuai kondisi desa? (RW)
9. Bagaimana tanggapan masyarakat terhadap Sosialisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Oleh Pemerintah Desa Muara Uwai Kepada Masyarakat apakah berjalan dengan baik atau tidak? (BPD, Kepala Dusun, RT dan RW)
10. Bagaimana tanggapan Pemerintah Desa terhadap Sosialisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Oleh Pemerintah Desa Muara Uwai Kepada Masyarakat apakah berjalan dengan baik atau tidak? (Kepala Desa)
11. Apa saja kendala-kendala yang dihadapi dalam Pelaksanaan Sosialisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Oleh Pemerintah Desa Muara Uwai Kepada Masyarakat? (Kepala Desa dan BPD, Kepala Dusun, RT dan RW)

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

atau masalah.

Kasim Riau

PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul *"PELAKSANAAN SOSIALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA OLEH PEMERINTAH DESA MUARA UWAI KEPADA MASYARAKAT BERDASARKAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 114 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN PEMBANGUNAN DESA"* yang ditulis oleh :

Nama : **MHD IRWANUL HAKIM**
NIM : 11627103937
Program Studi : Ilmu Hukum

Telah dimunaqasahkan pada :

Hari / Tanggal : Selasa, 27 Juli 2021
Waktu : 13.00 WIB
Tempat : Daring (Online)

Telah di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sutan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 2 Agustus 2021

TIM PENGUJI MUNAQASAH

Ketua
Firdaus, SH., MH.

Sekretaris
Ilham Akbar, SH., MH

Penguji I
Peri Pirmansyah, SH., MH

Penguji II
Lysa Angraini, SH., MH



Kepala Sub Bagian Akademik
Fakultas Syariah dan Hukum


Jalmus.S.Ag

NIP. 19750801 200701 1 023



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARI'AH & HUKUM

كلية الشريعة و القانون
FACULTY OF SYARI'AH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 P.O. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/1302/2021
Sifat : Biasa
Lamp. : 1 (Satu) Proposal
Hal : **Mohon Izin Riset**

Pekanbaru, 20 Januari 2021

Kepada
Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Provinsi Riau

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : MHD IRWANUL HAKIM
NIM : 11627103937
Jurusan : Ilmu Hukum S1
Semester : IX (Sembilan)
Lokasi : Desa Muara Uwai Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang
berjudul : PELAKSANAAN SOSIALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DESA OLEH PEMERINTAH DESA MUARA UWAI KEPADA
MASYARAKAT BERDASARKAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR 114 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN PEMBANGUNAN DESA

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai
tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan
memberikan izin guna terlaksana riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.

a.n. Rektor
Dekan



Dr. Drs. H. Hajar., M.Ag
NIP. 19580712 198603 1 005

Tembusan :
Rektor UIN Suska Riau



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 **PEKANBARU**
Email : dpmptsp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMTSP/NON IZIN-RISET/38084
T E N T A N G



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/1302/2021 Tanggal 20 Januari 2021**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

- | | | |
|----------------------|---|--|
| 1. Nama | : | MHD. IRWANUL HAKIM |
| 2. NIM / KTP | : | 11627103937 |
| 3. Program Studi | : | ILMU HUKUM |
| 4. Jenjang | : | S1 |
| 5. Alamat | : | PEKANBARU |
| 6. Judul Penelitian | : | PELAKSANAAN SOSIALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA OLEH PEMERINTAH DESA MUARA UWAI KEPADA MASYARAKAT BERDASARKAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 114 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN PEMBANGUNAN DESA |
| 7. Lokasi Penelitian | : | DESA MUARA UWAI KECAMATAN BANGKINANG KABUPATEN KAMPAR |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 27 Januari 2021



Ditandatangani Secara Elektronik Melalui :
Sistem Informasi Manajemen Pelayanan (SIMPEL)

**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI RIAU**

Tembusan :

Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Bupati Kampar
Up. Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik di Bangkinang
3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan



PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

JALAN TUANKU TAMBUSAI TELP. (0762) 20146
BANGKINANG KOTA

Kode Pos : 28412

REKOMENDASI

Nomor : 070/BKBP/2021/70

Tentang

**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kampar setelah membaca Surat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau Nomor : 503/DPMPSTP/NON IZIN-RISET/38084 tanggal 27 Januari 2021, dengan ini memberi Rekomendasi /Izin Penelitian kepada:

1. Nama : **MHD. IRWANUL HAKIM**
2. NIM : 11627103937
3. Universitas : UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUSKA RIAU
4. Program Studi : ILMU HUKUM
5. Jenjang : S1
6. Alamat : PEKANBARU
7. Judul Penelitian : **PELAKSANAAN SOSIALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA OLEH PEMERINTAH DESA MUARA UWAI KEPADA MASYARAKAT BERDASARKAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 114 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN PEMBANGUNAN DESA**
8. Lokasi : DESA MUARA UWAI KECAMATAN BANGKINANG KABUPATEN KAMPAR

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak melakukan Penelitian yang menyimpang dari ketentuan dalam proposal yang telah ditetapkan atau yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan riset/prariset dan pengumpulan data ini.
2. Pelaksanaan kegiatan penelitian/pengumpulan data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini dikeluarkan.

Demikian rekomendasi ini diberikan, agar digunakan sebagaimana mestinya dan kepada pihak yang terkait diharapkan untuk dapat memberikan kemudahan dan membantu kelancaran kegiatan Riset ini dan terima kasih.

Dikeluarkan di Bangkinang
pada tanggal 01 Februari 2021

an. **KEPALA BADAN KESBANGPOL KAB. KAMPAR**

Kabid. Ideologi, Wawasan Kebangsaan,
Dan karakter bangsa,

ONNITA, SE

Penata Tk. I

NIP. 19661009 198803 2 003

Rekomendasi ini disampaikan Kepada Yth;

1. Sdr. Camat Bangkinang di Muara Uwai.
2. Kepala Desa Muara Uwai di Bangkinang.
3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru.
4. Yang Bersangkutan.



PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
KECAMATAN BANGKINANG

KANTOR KEPALA DESA MUARA UWAI

Jl. KH. M. Nur Mahyuddin No. 103 Muara Uwai Bangkinang Telp. ... Kode Pos 28451

SURAT KETERANGAN

Nomor : 400/PEM-MUI/ 94

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **ZUBIR**
Jabatan : Kepala Desa Muara Uwai
Kecamatan Bangkinang Kabupaten kampar

Dengan ini menerangkan bahwa yang bersangkutan dibawah ini:

Nama : **MHD. IRWANUL HAKIM**
Nim : 1162710937
Pekerjaan : Mahasiswa
Jurusan : S-1 Ilmu Hukum
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN SUSKA RIAU

Benar sudah mengambil data dan telah selesai melakukan penelitian mengenai ***"Pelaksanaan Sosialisai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa oleh Pemerintahan Desa Muara Uwai kepada Masyarakat berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa"*** di Desa Muara Uwai Kecamatan Bangkinang guna menyelesaikan tugas Program Studi S-1 Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum UIN SUSKA RIAU.

Apabila Surat Keterangan ini salah atau tidak benar, maka yang bersangkutan bersedia dituntut dengan peraturan undang-undang dan hukum yang berlaku tanpa melibatkan Desa Muara uwai dan Pemerintahan Desa Muara Uwai. Pihak Desa Muara Uwai dapat membatalkan Surat ini apabila disalah gunakan oleh yang bersangkutan atau pernyataan tersebut tidak benar atau palsu.

Demikian Surat Keterangan ini kami keluarkan dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana perlunya.

DIKELUARKAN DI : MUARA UWAI
PADA TANGGAL : 06-04-2021
KEPALA DESA MUARA UWAI



Tembusan :

1. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN SUSKA RIAU di Pekanbaru
2. Sdr. Yang bersangkutan



JURNAL HUKUM ISLAM

مجلة الأحكام الشرعية

Journal For Islamic Law

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM 18 Simpang Baru, Panam Pekanbaru 28293

Po. Box 1004 Telp. (0761) 561645 Fax. (0761) 562052

www. Jurnalhukumislam.com email, admin@jurnalhukumislam.com

HP. 081275158167 – 085213573669

SURAT KETERANGAN

Pengelola Jurnal Hukum Islam dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : MHD IRWANUL HAKIM
NIM : 11627103937
Jurusan : ILMU HUKUM
Judul : PELAKSANAAN SOSIALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN
 BELANJA DESA OLEH PEMERINTAH DESA MUARA UWAI
 EPADA MASYARAKAT BERDASARKAN PERATURAN
 MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 114 TAHUN 2014 TENTANG
 PEDOMAN PEMBANGUNAN DESA

Pembimbing : Muslim, S.Ag, S.H, M.Hum

Nama tersebut diatas telah menyerahkan jurnal Skripsi sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.

Pekanbaru, 19 Agustus 2021
 An. Pimpinan Redaksi



Dr. M. Alpi Syahrin, SH., MH., CPL
 NIP. 198804302019031010



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Mhd Irwanul Hakim, lahir di Bangkinang pada tanggal 28 Oktober 1997 dari pasangan Ayahanda Abu Bakar, B.Sc dan Ibunda Nurhayati, yang merupakan anak le 2 dari 5 bersaudara. Pada tahun 2004 Penulis memulai pendidikan di SD MUHAMMADIYAH 048 Bangkinang dan selesai pada tahun 2010.

Kemudian pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan di Pondok Pesantren Daarun Nahdhah Thawalib Bangkinang dan lulus pada tahun 2016. Pada tahun yang sama Penulis melanjutkan pendidikan tinggi di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau pada Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Ilmu Hukum.

Atas berkat dan rahmat Allah SWT serta do'a dan dukungan dari orang – orang tercinta, akhirnya penulis mampu menyelesaikan skripsi dengan judul “ Pelaksanaan Sosialisai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Oleh Pemerintah Desa Muara Uwai Kepada Masyarakat Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa “ di bawah bimbingan bapak Muslim, S.Ag, S.H, M.Hum dan menyelesaikan skripsi pada tahun 2021.